



# Indeks Pembangunan **Manusia** KOTA BONTANG 2021





# Indeks Pembangunan Manusia

## KOTA BONTANG 2021



# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG 2021

**ISSN:** 2656-9256

**Nomor Publikasi:** 64740.2206

**Katalog:** 4102002.6474

**Ukuran Buku:** 14,8 cm X 21 cm

**Jumlah Halaman:** xii + 78 halaman

**Naskah:**

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

**Penyunting:**

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

**Desain Kover oleh:**

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

**Penerbit:**

© Badan Pusat Statistik Kota Bontang

**Pencetak:**

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

# TIM PENYUSUN

## Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang 2021

### Penanggung Jawab Umum:

Widiyantono, S.S.T, M.Stat.

### Penyunting:

Shery Mardiyah, S.S.T.

Della Nabiela, S.Tr.Stat.

### Penulis:

Naura Vedilia Nugraheni, S.Tr.Stat.

### Pengolah Data:

Shery Mardiyah, S.S.T.

Naura Vedilia Nugraheni, S.Tr.Stat.

### Gambar Kulit:

Naura Vedilia Nugraheni, S.Tr.Stat.



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berkat, anugerah serta Karunia-Nya yang melimpah sehingga publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Tahun 2021 dapat diterbitkan.

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penyajian IPM menurut daerah memungkinkan setiap daerah mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Dengan demikian, setiap daerah diharapkan terpacu untuk meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam memberikan data dan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan publikasi ini sehingga dapat diterbitkan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga publikasi ini membawa banyak manfaat.

Bontang, Juni 2022

Kepala BPS Kota Bontang



Widiyantono, S.S.T., M.Stat.

<https://bontangkota.bps.go.id>

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Tujuan .....	5
1.3. Fungsi, Lingkup, dan Keterbatasan .....	6
<b>BAB II FORMULA DAN METODE PERHITUNGAN</b> .....	<b>11</b>
2.1. Pengukuran IPM .....	13
2.1.1. Angka Harapan Hidup .....	18
2.1.2. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah ...	19
2.1.3. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan .....	21
2.1.4. Pertumbuhan IPM .....	22
2.2. Definisi Operasional Indikator Terpilih .....	23
<b>BAB III PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG</b> .....	<b>27</b>
3.1. Pembangunan Manusia Kota Bontang .....	29
3.2. Status IPM Kota Bontang .....	32
<b>BAB IV INDIKATOR PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG</b> .....	<b>33</b>
4.1. Indeks Kesehatan .....	35
4.2. Indeks Pendidikan .....	41

4.3. Indeks Pengeluaran .....	52
4.4. Keterbandingan IPM antar Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
5.1. Kesimpulan .....	73
5.2. Saran .....	76

<https://bontangkota.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Indikator Indeks Pembangunan Manusia .....	17
Tabel 2.2. Kriteria Status Pembangunan Manusia .....	18
Tabel 2.3. Konversi Tahun Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan untuk Menghitung Rata-Rata Lama Sekolah .....	20
Tabel 3.1. IPM Kota Bontang Menurut Komponen, 2014-2021 .....	30
Tabel 4.1. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan, 2020-2021 .....	39
Tabel 4.2. Jumlah Sekolah di Kota Bontang .....	46
Tabel 4.3. Rasio Murid–Guru Menurut Jenjang Pendidikan, 2011-2021 .	47
Tabel 4.4. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Kota Bontang Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2010-2021 .....	49
Tabel 4.5. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD, SMP, dan SMA/SMK Kota Bontang, 2021 .....	51
Tabel 4.6. Indikator Ketenagakerjaan Kota Bontang, 2014 - 2021 .....	54
Tabel 4.7. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Kota Bontang, 2014-2021 .....	56
Tabel 4.8. Struktur Perekonomian Kota Bontang dengan Migas, 2021 ...	60
Tabel 4.9. Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB dengan Migas dan Tanpa Migas Kota Bontang (ribu rupiah), 2017-2021 .....	62
Tabel 4.10. Perkembangan PDRB Migas dan Tanpa Migas ADHB Kota Bontang, 2010-2021 .....	63

Tabel 4.11. Indikator Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur  
Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, 2021 ..... 67

<https://bontangkota.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1. Dimensi Pembangunan Manusia .....	5
Gambar 2.2. Perubahan Metodologi IPM .....	14
Gambar 2.3. Tahapan Penghitungan Pengeluaran Riil Disesuaikan .....	21
Gambar 2.4. Penghitungan Paritas Daya Beli (dihitung dari bundel komoditas makanan dan non makanan) .....	22
Gambar 3.1. Tren IPM dan Pertumbuhan IPM Kota Bontang Tahun 2010-2021 .....	31
Gambar 4.1. Indeks Penyusun IPM .....	36
Gambar 4.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bontang, 2010-2021 .....	37
Gambar 4.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kota Bontang, 2021 .....	40
Gambar 4.4. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Bontang (tahun), 2010-2021 .....	42
Gambar 4.5. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Bontang (tahun), 2010-2021 .....	43
Gambar 4.6. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Kota Bontang, 2010-2021 .....	53
Gambar 4.7. Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Riil Per Kapita (000 rupiah) Kota Bontang, 2010-2021 .....	58
Gambar 4.8. Laju Pertumbuhan PDRB Dengan Migas dan Tanpa Migas Kota Bontang, 2011-2021 (persen) .....	64

Gambar 4.9. Keterbandingan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2021 ..... 66

<https://bontangkota.bps.go.id>

...

# Bab 1

## Pendahuluan



<https://bontangkotatrans.go.id>





## 1.1. Latar Belakang

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.”

Kalimat pembuka pada *Human Development Report (HDR)* pertama yang dipublikasikan oleh UNDP tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan.

Konsep ini terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan PDB) ke diskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan. (BPS, 2015).

Fokus dan sasaran akhir pembangunan manusia antara lain tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), dan peningkatan pendidikan (kemampuan proses capaian pendidikan, keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Konsep pembangunan manusia jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan (*economic growth*), kebutuhan dasar (*basic needs*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), atau pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*). Dalam perspektif the *United Nations Development Programme* (UNDP) pembangunan manusia (*human development*) dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UNDP, 1990). Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, fokus utama pembangunan tidak cukup hanya pembangunan ekonomi semata, tetapi lebih diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia. Selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Hal ini karena pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan penduduk miskin untuk meningkatkan nilai asetnya mengingat aset terpenting mereka adalah tenaga mereka (Lanjouw, Pradhan, Saadah, Sayed, dan Sparrow, 2001).

Konsep pembangunan manusia telah mengalami pergeseran makna seiring perkembangan cara pandang manusia. Pada dekade yang lalu, pembangunan manusia diukur berdasarkan mata pencaharian yang dimiliki individu sebagai simbol kekayaan dan kesejahteraan ekonomi, saat ini konsep tersebut telah berkembang. Dimensi pembangunan manusia terdiri dari dua aspek sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.

# PEMBANGUNAN MANUSIA



Sumber: Sumber UNDP, 2015

**Gambar 1.1. Dimensi Pembangunan Manusia**

Aspek pertama adalah peningkatan kemampuan manusia (peningkatan waktu hidup yang lebih sehat dan lama, peningkatan pengetahuan, serta peningkatan standar hidup yang layak), kemudian yang kedua adalah penciptaan kondisi yang memungkinkan terjadinya pembangunan manusia (partisipasi dalam politik dan komunitas, kondisi lingkungan dalam jangka panjang, hak dan rasa aman) (UNDP, 2015).

Dengan latar belakang di atas, mengingat pentingnya mengetahui IPM suatu daerah, maka dalam publikasi ini diulas secara rinci perkembangan IPM Kota Bontang Tahun 2021.

## 1.2. Tujuan

Berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas), IPM dipakai untuk melihat kondisi dan potensi pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan manusia. IPM merupakan indeks komposit yang diharapkan

mampu mencerminkan perbandingan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah, khususnya di Kota Bontang tahun 2021.

Penghitungan indeks pembangunan manusia sampai ke tingkat kabupaten/kota sangat penting, mengingat proses desentralisasi (otonomi daerah) yang sedang berjalan di Indonesia saat ini yang tentunya terjadinya pemindahan sebagian besar proses pembangunan dari pemerintah pusat ke tangan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Untuk itu tentunya dibutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi setempat (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi) dengan dukungan data-data yang lebih memadai untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penghitungan IPM 2021 merujuk pada rekomendasi UNDP tentang penghitungan IPM Metode Baru 2010, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih terarah pada keadaan pembangunan manusia terkini di kota Bontang. Penghitungan IPM 2021 juga berguna untuk melihat capaian pembangunan manusia di Kota Bontang pada tahun 2021 dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan perumusan arah kebijakan oleh pemerintah daerah, sehingga diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih terarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.

### **1.3. Fungsi, Lingkup, dan Keterbatasan**

IPM adalah indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. IPM mencoba menggambarkan pembangunan manusia atau mutu hidup ke dalam suatu angka indeks. IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di

DPR-RI. IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan komponen dalam indikator IPM merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah (DID).

IPM memiliki kelemahan dalam hal dari segi data dan arti. Dari segi data, kelemahannya terletak pada definisi/konsep dan kualitas data yang digunakan antar daerah maupun antar negara sangat beragam, sehingga mengurangi kekuatan IPM sebagai alat banding di tingkat internasional. IPM juga membutuhkan indikator yang kuantitatif, sehingga untuk beberapa hal IPM mempunyai kelemahan karena tidak mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan output ketiga komponen di sebuah negara berkembang. Kelemahan lain yang bersifat umum dari suatu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual.

Fungsi IPM sebagai sarana untuk menarik perhatian masyarakat terhadap masalah pembangunan manusia telah diakui secara luas. *Statistical Institute for Asia and The Pasific (SIAP)* merekomendasikan negara anggotanya untuk menghitung IPM sebagai alat perbandingan antar wilayah di dalam suatu negara, karena pada umumnya definisi/ konsep sistem perstatistikan wilayah-wilayah dalam satu negara relatif sama sehingga kualitas data yang dihasilkan pun sama.

Diperkenalkannya IPM pada tahun 1990, pada tahun 1995 UNDP memperkenalkan dua jenis indeks pembangunan manusia yang berkaitan dengan gender yaitu (1) *Gender Related Development Index (GDI)* atau indeks pembangunan gender (IPG); dan (2) *Gender Emporment Measure (GEM)* atau indeks pemberdayaan gender (IDG). IPG seperti halnya IPM merupakan suatu indeks komposit yang diharapkan dapat merefleksikan capaian upaya keseluruhan pembangunan manusia. Berbeda dengan IPM, penghitungan IPG memperhatikan ketidaksamaan gender.

Telah diakui secara luas bahwa suatu faktor krusial bagi keberhasilan upaya pembangunan manusia adalah pemberdayaan gender. Sebagai upaya agar faktor tersebut dapat dilihat maka UNDP mengembangkan IDG. Indeks komposit ini menggunakan variabel yang secara eksplisit mengukur pemberdayaan relatif laki-laki dan wanita dalam politik dan ekonomi. IPM dan ukuran- ukuran lain yang telah dikemukakan digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia secara rata-rata, tetapi tidak mengukur kesenjangan manusia (*human deprivations*).

UNDP pada tahun 1997 memperkenalkan indeks kemiskinan manusia (IKM) atau *Human Poverty Index (HPI)*. Indeks ini mencoba mengungkap deprivasi yang terjadi. Komponen IKM adalah (1) persentase penduduk yang tidak mampu bertahan hidup (meninggal) hingga umur 40 tahun sebagai refleksi dari deprivasi hidup sehat dan panjang umur; (2) persentase penduduk dewasa yang buta huruf sebagai refleksi dari deprivasi di bidang pendidikan (dalam IPM metode baru 2010 menjadi pencapaian tingkat pendidikan), dan (3) akses kepada pembangunan kesehatan, air bersih dan persentase balita yang kurang gizi. Indeks komposit dari ketiganya mewakili deprivasi dari keseluruhan yang terkait dengan ekonomi. Bila IPM mengukur pencapaian rata-rata pada setiap komponennya, maka indeks kemiskinan manusia/IKM mengukur magnitude (arah) dan deprivasi (kesenjangan).

Diterbitkannya *Human Development Report (HDR)–Human Development Index (HDI)* oleh UNDP akan memudahkan para pembuat kebijakan untuk mengukur pembangunan manusia. Hal ini disebabkan antara lain oleh kesederhanaan metode penghitungannya, bersifat global, tidak terlalu rinci, dan merupakan kombinasi komponen sosial dan ekonomi.

Dalam era otonomi daerah, prioritas pembangunan perlu benar-benar diarahkan pada kelompok penduduk, daerah dan sektor yang paling kritis

untuk mendapat perhatian. Apalagi dana daerah otonom tersebut sangat terbatas sehingga alokasinya perlu disusun seefisien mungkin. Oleh karena itu kehadiran HDR dan HDI menjadi lebih strategis bagi para pembuat kebijakan di kabupaten/kota.

<https://bontangkota.bps.go.id>



...

## Bab 2 Formula dan Metode Perhitungan



<https://tantangkotaapps.go.id>





## 2.4. Pengukuran IPM

*Human Development Report* (Laporan Pembangunan Manusia) yang pertama pada tahun 1990 mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk membuat manusia mampu mempunyai lebih banyak pilihan. Pendapatan adalah salah satu dari pilihan yang dimiliki manusia, tetapi bukanlah suatu totalitas dari semua aspek kehidupan manusia, pilihan yang tidak kalah penting adalah pilihan kesehatan, pengetahuan, lingkungan fisik yang baik dan kebebasan untuk bertindak. Dengan adanya pilihan-pilihan tersebut diharapkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia tersebut.

Status dan kemajuan pembangunan manusia (UNDP; 1990) ukuran umum yang dipakai adalah Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit yang dapat mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah dalam tiga dimensi indikator komponen pilihan dasar yaitu :

1. Lamanya hidup adalah hidup sehat dan umur panjang yang diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir.
2. Pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan rata-rata antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan
3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita atau Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) per kapita.

Indikator IPM yang dipilih cukup sensitif dan dapat berperan sebagai refleksi tentang fenomena perkembangan manusia. Dalam pemilihan indikator mendasarkan pada pendekatan masukan (input) dan pendekatan hasil (output). Pendekatan masukan sebagai variabel yang mempengaruhi dan pendekatan hasil sebagai variabel yang dipengaruhi. Indikator yang dipengaruhi disebut sebagai indikator inti dan indikator yang memengaruhi

disebut sebagai indikator sektoral.

Sejak awal diluncurkan di tahun 1990 hingga 2014, metodologi penghitungan IPM sudah beberapa kali mengalami perubahan. Jika di tahun 1990, komponen yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Anak Melek Huruf (AMH), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dimana untuk menghitung ketiga dimensi tersebut menjadi indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik. Pada tahun 2010, UNDP mengubah komponen yang digunakan yaitu: AHH, Rata-rata lama sekolah (RLS), Harapan lama sekolah (HLS), dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita dengan perhitungan yang semula menggunakan rata-rata aritmatik, berubah menjadi rata-rata geometrik. Perubahan metode penghitungan IPM sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 2.2. Perubahan Metodologi IPM**

Dalam penghitungan IPM tahun 2014, BPS secara nasional melaksanakan *upgrading* metodologi penghitungan Angka IPM, hal ini dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain :

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam

mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi (mendekati 100 persen), sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

2. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Perubahan yang terjadi adalah pada indikator yang mendasari perhitungan IPM dan metode agregasi penghitungan yang digunakan. Indikator Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Harapan Lama Sekolah, dan PDRB perkapita diganti dengan PNB perkapita. Sedangkan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Dengan perubahan ini diharapkan dapat menjadi indeks yang diskriminatif (dapat membedakan kondisi antar daerah dengan baik). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Sementara PNB menggantikan PDB/PDRB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Kemudian perubahan dalam metode agregasi lebih memungkinkan untuk mencapai pembangunan manusia yang baik tidak bisa hanya mengandalkan salah satu dimensi dasar saja tetapi ketiga dimensi dasar tersebut harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang

digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Dimensi Pendidikan :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran :

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Dengan metode penghitungan yang baru maka data-data yang dapat diimplementasikan dalam metode penghitungan baru tersebut adalah sebagai berikut:

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010 (SP2010), Proyeksi Penduduk.
- Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah diperoleh dari sumber

data hasil (Survei Sosial Ekonomi Nasional/ SUSENAS)

- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS merujuk pada 96 komoditas dari sebelumnya hanya 27 komoditi.
- Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali pengeluaran per kapita sebagai refleksi hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia, UNDP menetapkan Nilai Maksimum dan Minimum untuk masing-masing indikator yang juga menjadi acuan BPS dalam menghitung IPM hingga ke tingkat Kabupaten dan Kota. Standar nilai untuk menghitung IPM disajikan dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Indikator Indeks Pembangunan Manusia**

Komponen IPM	Nilai <sup>1)</sup>		Keterangan
	Maksimum	Minimum	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	20	Standar UNDP
Harapan Lama Sekolah	18	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	UNDP menggunakan <i>combined gross enrolment ratio</i>
Paritas Daya Beli	26.572.352 <sup>a)</sup>	1.007.436 <sup>b)</sup>	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

<sup>a)</sup> daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten (Jaksel) yang diproyeksikan hingga 2025

<sup>a)</sup> daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (Tolikara)

<sup>1)</sup> nilai maksimum dan minimum sesuai dengan ketentuan UNDP (1994;108) kecuali untuk *Purchasing Power Parity (PPP)*

Penetapan nilai tersebut memberikan keuntungan antara lain bahwa angka IPM yang dihasilkan :

- Dapat dibandingkan antar waktu (karena angka ideal tidak akan tercapai oleh IPM suatu daerah dalam waktu dekat).
- Dapat diletakkan dalam skala nasional bahkan internasional karena 3 dari 4 komponen yang digunakan berlaku secara internasional.

Tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah oleh UNDP dibagi ke dalam tiga golongan yaitu rendah (kurang dari 60), sedang (60 sampai 69), tinggi (70 sampai 79), dan sangat tinggi (80 ke atas). Sedangkan untuk keperluan perbandingan antar kabupaten/kota tingkatan status menengah dipecah lagi menjadi dua, yaitu menengah bawah dan menengah atas. Dengan demikian kriteria tingkatan status pembangunan manusia sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Kriteria Status Pembangunan Manusia**

<b>Tingkatan Status</b> (1)	<b>Kriteria</b> (2)
Rendah	$IPM < 60$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$

Sumber: Badan Pusat Statistik

### 2.1.1. Angka Harapan Hidup

Indikator angka harapan hidup merupakan salah satu dimensi dasar pembangunan manusia khususnya di bidang kesehatan yang diharapkan dapat mencerminkan “lama hidup” sekaligus “hidup sehat” dalam masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun

yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Angka harapan hidup yang digunakan untuk menghitung IPM Tahun 2021 bersumber dari data Sensus Penduduk 2010. Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya.

### **2.1.2. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas (BPS).

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Konversi yang digunakan untuk menghitung rata-rata lama sekolah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3.

**Tabel 2.3. Konversi Tahun Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan untuk Menghitung Rata-Rata Lama Sekolah**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (1)	Lama Sekolah (Tahun) (2)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0
2. Sekolah Dasar (SD)	6
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	9
4. Sekolah Menengah (SMA & yang sederajat)	12
5. Diploma I (DI)	13
6. Diploma II (DII)	14
7. Akademi/Diploma III (DIII)	15
8. Diploma IV/Sarjana	16
9. S2	18
10. S3	21

Sumber: BPS Kota Bontang

### 2.1.3. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan dihitung dari level provinsi hingga kabupaten dan kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat *constant/riil* dengan tahun dasar 2012 = 100.



Sumber: Badan Pusat Statistik RI

**Gambar 2.3. Tahapan Penghitungan Pengeluaran Riil Disesuaikan**

Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao. Gambar 2.3. menunjukkan bahwa 39,8 persen pengeluaran untuk bahan makanan dan 36,9 persen untuk non makanan.



Sumber: Badan Pusat Statistik RI

**Gambar 2.4. Penghitungan Paritas Daya Beli (dihitung dari bundel komoditas makanan dan non makanan)**

#### 2.1.4. Pertumbuhan IPM

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, perlu diperhatikan tingkat kemajuan pembangunan manusia. Aspek yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia tersebut selain membandingkan antar wilayah atau posisi suatu wilayah relatif terhadap wilayah yang lain berdasarkan besaran IPM adalah mengkaji/mengukur kecepatan perkembangan IPM dengan menggunakan ukuran pertumbuhan per tahun.

Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

## 2.2. Definisi Operasional Indikator Terpilih

Untuk dapat melihat dengan jelas dan terarah beragam persoalan pembangunan manusia selama ini serta bagaimana mengimplementasikan program-program pembangunan secara benar dan terukur diperlukan adanya suatu ukuran indikator yang reliable dan handal. Berikut beberapa definisi operasional yang sering digunakan dalam hal pembangunan manusia:

- **Rasio jenis kelamin:** Perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, dikalikan 100.
- **Angka ketergantungan:** Perbandingan antara jumlah penduduk usia < 15 tahun ditambah usia > 65 tahun terhadap penduduk usia 15 - 64 tahun, dikalikan 100.
- **Rata-rata Lama Sekolah:** penduduk usia 25 tahun ke atas.
- **Harapan Lama Sekolah:** harapan penduduk usia 7 tahun ke atas untuk dapat bersekolah.
- **Angka Partisipasi Murni SD:** Proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD.
- **Angka Partisipasi Murni SLTP:** Proporsi penduduk usia 13 - 15 tahun yang sedang bersekolah di SLTP.
- **Angka Partisipasi Murni SLTA:** Proporsi penduduk usia 16 - 18 tahun yang sedang bersekolah di SLTA.

- **Jumlah penduduk usia sekolah:** Banyaknya penduduk yang berusia antara 7 sampai 24 tahun.
- **Bekerja:** Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.
- **Angkatan Kerja:** Penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja:** Perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun.
- **Angka Pengangguran Terbuka:** Perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja.
- **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri:** Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas dengan status berusaha sendiri.
- **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tidak tetap:** Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tak dibayar.
- **Persentase pekerja dengan status berusaha dengan buruh tetap:** Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas yang berusaha dengan buruh tetap.
- **Persentase pekerja dengan status berusaha pekerja tak dibayar:** Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status pekerja keluarga.
- **Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis:** Proporsi balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya).
- **Angka Harapan Hidup waktu lahir:** Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk.

- **Angka Kematian Bayi:** Besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup.
- **Persentase rumah tangga beratap layak:** Proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan atap layak (atap selain dari dedaunan).
- **Persentase rumah tangga berpenerangan Listrik:** Proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik.
- **Persentase rumah tangga bersumber air minum leding:** Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum leding.
- **Persentase rumah tangga bersumber air minum bersih:** Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum pompa / sumur / mata air yang jaraknya lebih besar dari 10 meter dengan tempat penampungan limbah kotoran terdekat.
- **Persentase rumah tangga berjamban dengan tangki septik:** Proporsi rumah tangga yang mempunyai jamban dengan tangki septik.
- **Penduduk Miskin:** Penduduk yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kalori dan kebutuhan non makanan yang mendasar.
- **Garis Kemiskinan:** Suatu batas dimana penduduk dengan pengeluaran kurang dari batas tersebut dikategorikan sebagai miskin. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu komponen batas kecukupan pangan (GKM) dan komponen batas kecukupan non makanan (GKNM).



...

# Bab 3

## Perkembangan IPM

### Kota Bontang



<https://bontangkota.go.id>





### 3.1. PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG

Pembangunan manusia merupakan isu yang strategis sehingga capaiannya perlu dipantau. Dalam rangka memonitor pembangunan manusia antar wilayah di Indonesia, BPS menghitung IPM pada tingkat regional sejak tahun 1996, yaitu provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada metodologi yang digunakan UNDP dengan penyesuaian beberapa indikator sesuai ketersediaan data sampai tingkat kabupaten/kota.

IPM sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki nilai yang baik, tentunya sumber daya manusia secara umum juga memiliki kualitas yang baik. Bagi suatu wilayah, angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut dan merupakan tantangan yang harus dihadapi serta upaya apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Untuk mengetahui sejauh mana pembangunan manusia di Kota Bontang, perlu diketahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

**Tabel 3.1. IPM Kota Bontang Menurut Komponen, 2014-2021**

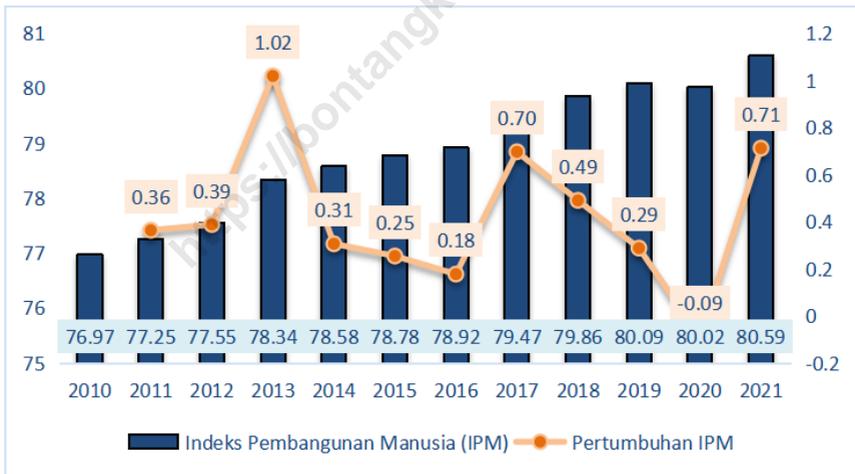
Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,68	73,69	73,71	73,72	73,94	74,18	74,28	74,55
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,68	12,77	12,79	12,88	12,89	12,90	13,03	13,17
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,35	10,38	10,39	10,70	10,72	10,73	10,79	10,80
Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu Rupiah)	15 878	15 980	16 157	16 271	16 698	16 843	16 278	16 765
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,58	78,78	78,92	79,47	79,86	80,09	80,02	80,59

Sumber: BPS Kota Bontang

IPM dan komponennya dapat dilihat pada Tabel 3.1 yang memperlihatkan seberapa besar tingkat pencapaian yang telah dilakukan khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pada Gambar 3.1 terlihat sejak tahun 2010, pembangunan manusia di Kota Bontang memperlihatkan perkembangan yang positif. Berdasarkan perhitungan dengan metode baru, tercatat IPM Kota Bontang tahun 2010 adalah 76,97. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2021 yaitu menjadi sebesar 80,59 dimana setiap tahunnya, IPM Kota Bontang meningkat rata-rata 0,34 poin per tahun. Selama tahun 2010-2021, telah terjadi kenaikan IPM hingga 3,62 poin. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kota Bontang.

Pada tahun 2021, angka harapan hidup saat lahir di Kota Bontang sudah mencapai 74,55 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2021 dapat bertahan hidup hingga usia 74,55 tahun.

Dari sisi pendidikan, harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas di Kota Bontang mencapai angka 13,17 tahun, atau dengan kata lain rata-rata penduduk usia 7 tahun ke atas yang memasuki jenjang per sekolah diharapkan dapat bersekolah hingga 13,17 tahun atau setara dengan satu tahun kuliah (Diploma I). Sedangkan pendidikan yang ditempuh riil oleh penduduk kota Bontang yang berusia 25 tahun ke atas adalah 10,80 tahun masa sekolah atau setara kelas X (kelas I SMA). Selain itu, Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita sudah mencapai Rp16.765.000 per kapita per tahun. Jika dilihat dari tahun 2010 hingga tahun 2021 seluruh komponen indikator IPM terus mengalami peningkatan yang menggambarkan semakin baik kualitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian Kota Bontang.



Sumber: BPS Kota Bontang

**Gambar 3.1. Tren IPM dan Pertumbuhan IPM Kota Bontang Tahun 2010-2021**

Kemajuan capaian pembangunan manusia juga dapat dilihat dari kecepatan pembangunan manusia sebagai cerminan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembangunan manusia. Semakin

tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM.

Selama periode 2010-2021, IPM Kota Bontang rata-rata tumbuh sebesar 0,42 persen per tahun. Pertumbuhan IPM di Kota Bontang relatif kecil karena pada umumnya, semakin tinggi nilai IPM suatu wilayah, maka tingkat pertumbuhannya relatif kecil.

### 3.2. Status IPM Kota Bontang

Salah satu cara untuk melihat perkembangan manusia di suatu daerah adalah dengan mengetahui status pembangunan manusia pada daerah itu. Terjadinya perubahan status pembangunan manusia dapat menjadi indikator perkembangan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan IPM menjadi 4 kelompok dengan kriteria:

Kelompok (1)	Kriteria (2)
Rendah	$IPM < 60$
Sedang	$60 < IPM < 70$
Tinggi	$70 < IPM < 80$
Sangat Tinggi	$IPM > 80$

Selama tahun 2010-2018, status pembangunan manusia di Kota Bontang telah berstatus “tinggi” dikarenakan nilainya berada diatas level 70 dan dibawah level 80. Dan selama tahun 2018-2021, IPM Kota Bontang telah berhasil meningkatkan statusnya memasuki level berstatus “sangat tinggi” yang menggambarkan semakin baiknya perkembangan manusia di Kota Bontang.

...

# Bab 4

## Indikator IPM

### Kota Bontang



<https://bontangkota.go.id>





## 4.1. Indeks Kesehatan

Pada tahun 1999, *The United Nations Development Programme* (UNDP) yakni organisasi multilateral yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan dunia, menciptakan alat ukur yang dinamakan *Human Development Indeks (HDI)* atau Indeks Pembangunan (IPM) yang digunakan banyak negara di dunia termasuk Indonesia. IPM dibuat dengan penekanan bahwa individu dengan kapabilitasnya mesti menjadi ukuran utama pembangunan suatu negara.

IPM merupakan ringkasan pencapaian rata-rata beberapa dimensi yakni: kehidupan yang sehat dan umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, angka harapan hidup saat lahir (AHH), harapan lama sekolah (EYS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (lihat gambar 4.1). Secara konseptual, bandar udara adalah suatu tempat/area yang memiliki fasilitas dan peralatan untuk menampung kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat terbang beserta penumpang dan barang yang diangkutnya. Namun jika dikaji lebih lanjut, saat ini bandar udara sudah merupakan suatu kawasan tersendiri baik dilihat dari sudut operasi penerbangan, sudut sosial ekonomi maupun dari sudut pertahanan dan keamanan negara.

Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, diperlukan kesehatan yang lebih baik. Pembangunan di bidang kesehatan mempunyai peranan dalam menekan angka mortalitas dan meningkatkan harapan hidup.

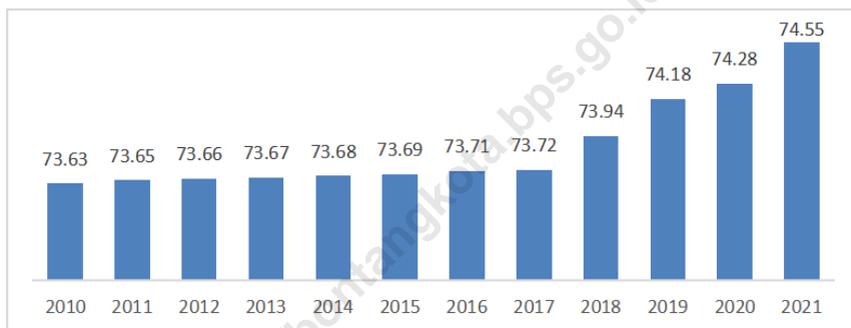


Sumber: Badan Pusat Statistik RI

**Gambar 4.1. Indeks Penyusun IPM**

Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Indikator ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu mempresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat

kesehatan yang baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai angka harapan hidup (AHH) yang lebih tinggi. Besarnya nilai AHH berkaitan erat dengan angka kematian bayi, yaitu makin tinggi angka kematian bayi maka makin menurun nilai AHH. Faktor yang memengaruhi perubahan AHH dapat ditinjau dari berbagai hal seperti kondisi lingkungan hidup, status sosial ekonomi, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi dan lain-lain.



Sumber: BPS Kota Bontang

**Gambar 4.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bontang, 2010-2021**

Gambar 4.2. di atas menunjukkan perkembangan AHH Kota Bontang selama periode 2010 hingga 2021. Pada gambar tersebut terlihat bahwa AHH Kota Bontang terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan AHH sebesar 0,92 poin. Pada tahun 2021, AHH di kota Bontang adalah 74,55 tahun yang artinya harapan hidup bayi yang baru lahir di tahun itu untuk bertahan hidup adalah 74,55 tahun.

Peningkatan AHH yang memang cukup kecil memerlukan upaya komprehensif sehingga peningkatan AHH melalui penurunan angka kematian bayi dapat diwujudkan. Upaya penurunan mortalitas perlu dilakukan seiring dengan usaha pengendalian fertilitas, karena keberhasilan mengurangi

laju pertumbuhan penduduk pada dasarnya akan mempercepat terjadinya peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian penanganan masalah demografi sepatutnya ditempatkan sebagai isu sentral dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi, baik untuk kesehatan, pendidikan, perumahan maupun perluasan kesempatan kerja. Hal itu diupayakan sebagai dasar untuk memperkuat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Keberhasilan pemerintah Kota Bontang di bidang kesehatan melalui indikator yang diukur dengan angka harapan hidup terus berupaya mewujudkan masyarakat sadar kesehatan melalui pemberian penyuluhan kesehatan agar keluarga berperilaku hidup sehat, pemberian BPJS PIB, serta melakukan perbaikan dan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan masyarakat termasuk belanja modal pengadaan gedung dan bangunan Rumah Sakit BLUD di RSUD Taman Husada, rehab/sedang/berat pembangunan Rumah Sakit Tipe D, dll.

Usia harapan hidup bukan merupakan variabel yang berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa variabel lain di antaranya angka kesakitan, lamanya sakit, serta rasio ketersediaan fasilitas kesehatan. Pada tahun 2021, prasarana kesehatan yang dimiliki oleh Kota Bontang meliputi 5 unit rumah sakit umum, 6 unit puskesmas non rawat inap, 16 klinik pratama, 122 posyandu, 2 klinik bersalin, 2 puskesmas pembantu, dan 30 praktek dokter perorangan.

Indikator kesehatan lainnya pada pembangunan manusia yang dapat dijadikan sebagai alat ukur adalah angka kesakitan. Angka kesakitan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, yang merupakan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan terhadap seluruh penduduk.

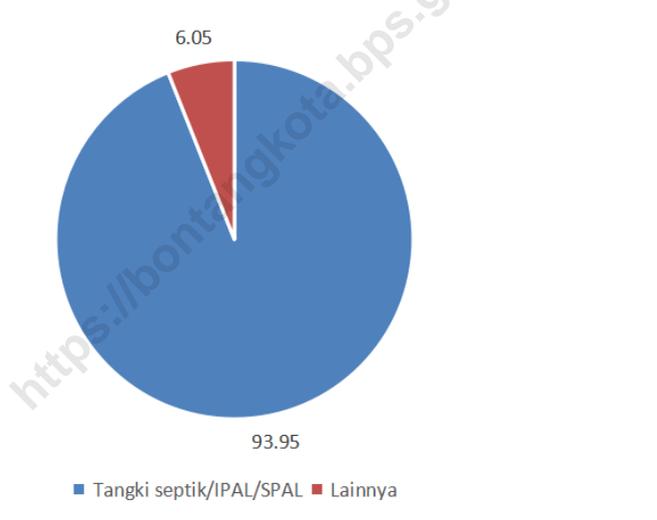
Persentase penduduk Kota Bontang yang mengalami keluhan gangguan kesehatan pada tahun 2021 untuk laki-laki adalah sebesar 4,77 persen dan perempuan sebesar 3,94 persen. Angka ini mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2020. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, terlihat bahwa pada tahun 2021 persentase penduduk laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi dari pada persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan. Upaya Pemerintah Kota Bontang dalam memberikan Program Jaminan Kesehatan melalui BPJS PBI diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup sehat. Salah satu upaya dari pemerintah Kota Bontang di bidang kesehatan yang terus ditingkatkan adalah dengan mendirikan Puskesmas Keluarga 24 jam yang menggabungkan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan Upaya Kesehatan Personal (UKP) sejak 1 Januari 2012. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah serta tidak terhalang oleh jarak dan waktu.

**Tabel 4.1. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan, 2020-2021**

Ada/tidak keluhan (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)
<b>2020</b>		
Ada keluhan	9,76	11,32
Tidak ada	90,24	88,68
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2021</b>		
Ada keluhan	4,77	3,94
Tidak ada	95,23	96,06
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kota Bontang (Susenas 2021, diolah)

Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa ada hubungan yang erat antara kualitas kehidupan di masa datang dengan keadaan fasilitas sanitasi dimana seseorang tinggal dimasa kecilnya. Anak yang tinggal di dalam lingkungan yang sehat, maka lebih kecil kemungkinannya untuk sakit yang pada banyak kasus bahkan meninggal. Selanjutnya jika angka kematian bayi tinggi di suatu daerah maka usia harapan hidupnya akan semakin rendah dan akan berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut.



Sumber: BPS Kota Bontang (Susenas 2021, diolah)

**Gambar 4.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kota Bontang, 2021**

Jika dilihat dari kondisi sanitasi rumah tangga di tahun 2021 sudah menunjukkan hasil yang sangat bagus. Sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 4.3, terdapat lebih dari 90 persen rumah tangga di Kota Bontang yang sudah menggunakan tangki septik/IPAL/SPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Namun, masih ada diatas 6 persen rumah tangga yang membuang

kotoran di tempat lainnya termasuk tempat terbuka. Keadaan ini dapat memudahkan tersebarnya virus atau bakteri penyebab penyakit.

## 4.2. Indeks Pendidikan

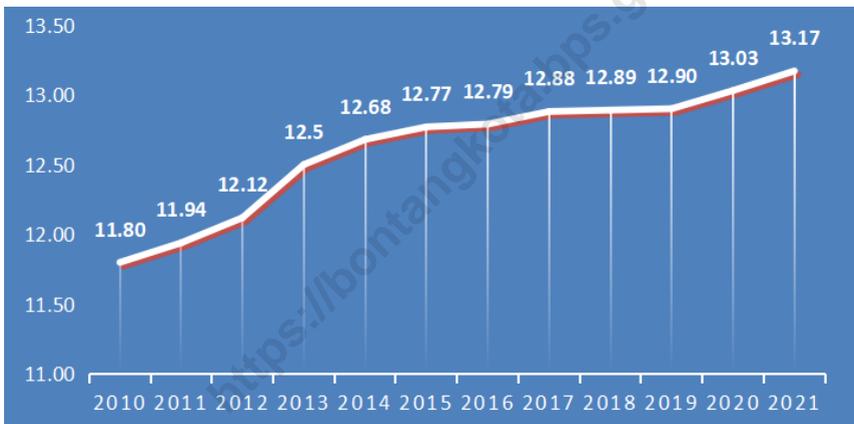
Peningkatan pembangunan manusia ke arah yang lebih baik, tidak terlepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan komponen terpenting, yang memiliki peranan dalam meningkatkan kualitas hidup. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, makin baik pula kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan dapat pula berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam pengertian sehari-hari, pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan. Bangsa yang cerdas dapat menyadari pentingnya masa depan yang berisi tantangan-tantangan tetapi juga harapan kepada suatu kehidupan yang lebih baik, lebih tenteram dan lebih adil. Kecerdasan ini bersumber dari pendidikan.

Dalam hal ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat Pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS/*Mean Years of Schooling*) dan Harapan Lama Sekolah (HLS/*Expected Years of Schooling*).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke

atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2021, HLS Kota Bontang mencapai 13,17 atau naik sebesar 0,14 poin dibandingkan tahun 2020. Gambar 4.4. merupakan tren HLS Kota Bontang selama periode 2010 hingga 2021. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa HLS Kota Bontang terus naik dari 11,80 tahun di 2010 menjadi 13,17 tahun 2021.



Sumber: BPS Kota Bontang

**Gambar 4.4. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Bontang (tahun), 2010-2021**

Selain Harapan Lama Sekolah, diperlukan suatu indikator lain yang dapat mewakili tingkat keterampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan. Makin lama seseorang mengenyam bangku sekolah diharapkan makin baik keterampilan yang dimiliki. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan hal itu adalah rata-rata lama sekolah. Ukuran tersebut memberikan sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk.

Gambar 4.5. memperlihatkan bahwa RLS Kota Bontang terus mengalami peningkatan. Awalnya, peningkatan RLS pada periode 2010 hingga 2016 tergolong landai yakni sebesar 0,01 s.d. 0,06 tahun. Selanjutnya pada periode 2016-2017 terjadi peningkatan cukup berarti yaitu sebesar 0,31 tahun dan pada pada periode 2017-2021 kembali melandai yaitu meningkat sebesar 0,01 s.d. 0,06 tahun. Secara keseluruhan telah terjadi kenaikan RLS 0,52 tahun sepanjang periode 2010 hingga 2021.



Sumber: BPS Kota Bontang

**Gambar 4.5. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Bontang (tahun), 2010-2021**

Rata-rata lama bersekolah (RLS) Kota Bontang di tahun 2021 mencapai angka 10,80 tahun, yang mengandung makna bahwa rata-rata penduduk Kota Bontang bersekolah hingga kelas sepuluh atau kelas dua Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan kata lain penduduk Kota Bontang rata-rata mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA selama lebih dari 1 tahun. Hal ini tentunya tidak terlepas dari banyaknya program pendidikan yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Bontang. Tidak dapat dipungkiri angka rata-rata lama sekolah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, karena tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang makin tinggi

dan peranan aktif dari pemerintah untuk membuka akses yang makin luas terhadap sarana dan fasilitas pendidikan.

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep *"link and match"*, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan jaman. Sedangkan yang dimaksudkan dengan efisiensi pengelolaan pendidikan adalah bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pemerintah menyadari bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Rendahnya pendapatan keluarga seringkali menjadi alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya. Realita ini senantiasa ditemui di sekeliling kita. Banyak anak yang seharusnya belajar, namun terpaksa bekerja untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Kondisi ini mendorong pemerintah membuat kebijakan wajib belajar pendidikan dasar enam tahun disusul dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun dan bahkan berkomitmen terhadap pendidikan 12 tahun yang dilaksanakan secara gratis. Program ini telah berjalan efektif di Kota Bontang sejak tahun 2004 hingga saat ini, melalui pembiayaan APBD setiap tahun.

Di tingkat regional khususnya di Kota Bontang selain dengan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, untuk menambah tingkat

kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan, pemerintah kota juga memberikan honor tambahan bagi tenaga pendidik dan administrasi di semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta, termasuk taman kanak-kanak. Selain memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah juga serius dalam menangani bidang pendidikan yaitu dengan dibebaskannya SPP dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas. Dan juga adanya pemberian beasiswa pendidikan, baik dari Pemerintah Kota maupun dari organisasi non pemerintah seperti PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kaltim kepada pegawai pemerintah daerah dan masyarakat Kota Bontang, sehingga memberikan dampak yang luas bagi percepatan peningkatan sumber daya manusia.

Pada tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah menunjukkan keseriusan dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan mewajibkan pendidikan 12 tahun dan mengalokasikan dana APBD untuk pendidikan SMA/SMK. Seperti halnya Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Bontang juga sangat memperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan mencanangkan program Bontang Cerdas mulai tahun 2010. Hal ini dituangkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang yaitu meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Dengan sasaran meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang profesional, optimalisasi minat baca masyarakat, terjamin dan terpeliharanya anak jalanan, anak disabilitas mendapatkan pendidikan, dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Berbagai program pendidikan subsidi secara merata ke seluruh sekolah dengan perhitungan yang sama telah digulirkan. Penekanan program adalah pada aspek kuantitas dan kualitas. Hal ini sangat dimaklumi karena pemerintah menginginkan agar penduduk terbebas dari masalah buta huruf, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar dan menengah.

Tolok ukur umum dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pendidikan disuatu wilayah adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, baik gedung sekolah, tenaga pengajar, dan rasio murid guru.

**Tabel 4.2. Jumlah Sekolah di Kota Bontang**

Tahun	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	55	34	20
2011	56	34	21
2012	59	34	22
2013	60	33	25
2014	60	33	25
2015	60	33	25
2016	61	35	26
2017	61	35	26
2018	61	34	27
2019	61	34	27
2020	61	33	27
2021	61	33	27

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang

Berdasarkan Tabel 4.2., selama tahun 2010-2021, terjadi perubahan jumlah sekolah baik pada tingkat Sekolah Dasar dan Menengah Atas. Penambahan sekolah-sekolah tersebut tentunya dalam rangka memenuhi pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah. Selain itu pembangunan sekolah juga dilakukan pada daerah yang selama ini berada cukup jauh dari sekolah yang sudah ada.

Indikator rasio murid-guru merupakan indikator yang penting, menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Selain itu, dengan

indikator ini dapat dilihat bagaimana kondisi kegiatan belajar-mengajar berkaitan dengan perhatian guru terhadap murid.

Makin besar rasio murid-guru, maka semakin besar beban yang ditanggung tiap gurunya. Semakin besar murid yang ditanggung per gurunya, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Hal ini dapat menuju makin rendahnya tingkat pengawasan/ perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran pun makin rendah. Namun demikian, rasio yang terlalu rendah merupakan indikasi bahwa telah terjadi inefisiensi karena kelebihan jumlah guru. Oleh sebab itu, beban mengajar seorang guru hendaknya mendekati batas kemampuan ideal. Menurut hasil beberapa penelitian, rasio murid-guru yang ideal agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif adalah 20, yaitu seorang guru menangani sekitar 20 orang murid untuk setiap kelas. Rasio murid-guru dapat dilihat pada Tabel 4.3. dibawah ini.

**Tabel 4.3. Rasio Murid–Guru Menurut Jenjang Pendidikan, 2011-2021**

Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 <sup>*)</sup>	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SD	18,68	17,69	20,17	18,78	19,75	16,38	19,30	18,27	18,14
SMP	15,28	13,86	16,76	15,62	15,19	14,80	15,83	15,04	15,54
SMA	12,10	9,91	13,29	12,54	12,01	-	13,45	13,48	14,46

*\*) Angka tahun 2020 berbeda dengan publikasi IPM tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perbaikan angka tahun 2020, yaitu penambahan jumlah murid dan guru untuk sekolah MI, MTs, dan MA*

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang

Pada tahun 2021, rasio murid guru masih memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu rasio terbesar adalah pada tingkat sekolah dasar, dan makin menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Namun secara proporsi pada tahun 2021 rasio jumlah murid terhadap guru

pada jenjang SMP dan SMA mengalami peningkatan, artinya seorang guru menangani jumlah murid yang lebih lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada tingkat SD, sekitar 18-19 orang murid ditangani oleh seorang guru. Pada tingkat SMP, sekitar 15-16 orang murid ditangani oleh seorang guru. Sementara itu pada tingkat pendidikan SMA, setiap 1 orang guru menangani sekitar 14-15 orang murid. Untuk tahun 2018, informasi mengenai rasio murid guru untuk jenjang SMA tidak ada karena pada tahun tersebut data untuk jenjang SMA dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

Sumber daya manusia suatu wilayah dapat dilihat salah satunya dengan tingkat pendidikan penduduk di wilayah tersebut. Tingkat pendidikan ini adalah jenjang pendidikan yang berhasil ditamatkan. Semakin tinggi pendidikan yang telah ditamatkan, maka semakin baik sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Dengan pendidikan yang tinggi diharapkan dapat bersaing dalam dunia tenaga kerja dan menjadi pekerja ahli. Hal ini dapat dilihat dari penduduk 10 tahun ke atas yang telah menamatkan di jenjang pendidikan tertentu. Berikut Tabel 4.4. menunjukkan persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan.

Pada tahun 2021, persentase penduduk yang berusia 10 tahun ke atas dengan jenjang pendidikan tertinggi SMA adalah 42,96 persen. Kemudian penduduk dengan pendidikan SD ke bawah adalah 28,51 persen. Penduduk dengan pendidikan SMP adalah 16,55 persen dan perguruan tinggi 11,98 persen. Persentase tamatan SMA adalah yang paling besar untuk penduduk usia 10 tahun ke atas di Kota Bontang, kemudian jenjang SD ke bawah, SMP, dan yang paling kecil adalah jenjang pendidikan perguruan tinggi. Dua variabel jenjang pendidikan menunjukkan peningkatan jumlah persentase dibanding tahun sebelumnya, yakni pada jenjang SMP dan SMA, persentase tamatan SMP meningkat sebanyak 1,55 persen dan SMA meningkat sebanyak 3,50 persen.

Meningkatnya persentase penduduk yang tamat SMP dan SMA, dan perguruan tinggi menjadi salah satu indikator bahwa pendidikan semakin mendapat posisi penting di Kota Bontang. Meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Bontang mengenai pentingnya pendidikan diharapkan akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdidik bagi Kota Bontang guna peningkatan pembangunan daerah.

**Tabel 4.4. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Kota Bontang Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2010-2021**

Tahun	SD ke Bawah	Tamat SMP	Tamat SMA	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	31,78	19,89	38,55	9,77
2011	32,95	17,88	38,66	10,51
2012	33,57	19,30	37,75	9,38
2013	30,93	19,76	36,61	12,70
2014	32,72	18,11	38,40	10,77
2015	34,58	16,77	37,06	11,59
2016	42,87	11,04	33,66	12,42
2017	31,32	18,71	37,43	12,53
2018	35,24	13,64	37,71	13,40
2019	33,09	16,19	37,88	12,84
2020	28,58	15,00	39,46	16,96
2021	28,51	16,55	42,96	11,98

Sumber: BPS Kota Bontang

Peningkatan persentase penduduk yang lulus SMA menjadi gambaran bagi pemerintah Kota Bontang untuk memperjuangkan Sekolah Tinggi/ Universitas di Kota Bontang. Hal ini untuk mengakomodir para lulusan tersebut agar bisa melanjutkan pendidikannya di Kota Bontang sehingga dapat menekan biaya pendidikan yang dikeluarkan.

Selain jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, untuk melihat kualitas pendidikan di suatu daerah juga diperlukan indikator lain adalah partisipasi sekolah. Untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah penduduk pada suatu wilayah, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, antara lain yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APK adalah persentase jumlah seluruh siswa pada setiap jenjang pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk usia pendidikan yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan. Misalnya, APK pada tingkat SD merupakan perbandingan jumlah murid di tingkat SD dengan jumlah penduduk yang berusia antara 7-12 tahun. Nilai APK dapat lebih dari 100 persen. Nilai APK dapat mengukur seberapa besar daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dan dapat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan pendidikan dimana memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

APM adalah persentase jumlah seluruh siswa usia pada suatu jenjang pendidikan tertentu dan berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama. Misalnya, nilai APM tingkat SMP adalah perbandingan antara jumlah siswa SMP yang berusia 13-15 tahun dengan jumlah penduduk yang berusia 13-15 tahun. Kebalikannya, nilai APM tidak bisa lebih dari 100 persen.

Nilai APM bertujuan mengukur berapa proporsi anak yang sekolah tepat waktu. Nilai APM akan selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai APK, karena nilai APM tidak mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang yang bersangkutan. Selisih dari keduanya (APK dengan APM) merupakan persentase siswa yang terlambat masuk sekolah ataupun yang terlalu cepat masuk sekolah.

Berdasarkan Tabel 4.5., dapat dilihat bahwa daya serap jenjang SD memiliki angka tertinggi yakni 104,94 diikuti jenjang SMP, dan SMA. Besaran APK setiap jenjang pendidikan yang sudah di atas 70 persen menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah di Kota Bontang sudah mampu menampung jumlah siswa sesuai dengan target. Pada indikator APK, kesesuaian usia siswa dengan jenjang pendidikan tidak terlihat secara jelas, karena bisa jadi ada siswa yang terlalu cepat atau justru terlambat memasuki bangku sekolah. Oleh karena itu APK masih merupakan ukuran kasar untuk melihat partisipasi sekolah. Untuk mendapatkan angka yang lebih tepat maka digunakanlah Angka Partisipasi Murni (APM).

**Tabel 4.5. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD, SMP, dan SMA/SMK Kota Bontang, 2021**

Jenjang Pendidikan (1)	APK (2)	APM (3)
SD	104,94	99,15
SMP	95,16	76,69
SMA/SMK	80,29	64,94

Sumber: BPS Kota Bontang

Berdasarkan data pada Tabel 4.5., dapat dilihat bahwa pada jenjang pendidikan SD, nilai APM Kota Bontang adalah sekitar 99,15 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih ada siswa di tingkat SD yang berusia bukan pada rentang 7-12 tahun, yakni 0,85 persen siswa berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. Begitu pula pada tingkat pendidikan SMP dan SMA, nilai APM Kota Bontang masing-masing adalah 76,69 persen dan 64,94 persen. Nilai APM Kota Bontang yang belum mencapai 100 persen menunjukkan masih terdapat penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan namun tidak sesuai pada jenjang pendidikannya.

### 4.3. Indeks Pengeluaran

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Salah satu sasaran pembangunan adalah perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang serta memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Angkatan kerja atau lebih dikenal dengan istilah tenaga kerja berdiri pada dua posisi penting dalam pembangunan, yaitu sebagai subjek sekaligus objek. Karena itu peningkatan dalam jumlah angkatan kerja bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan permasalahan berupa pengangguran.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Pekerjaan memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta kesetaraan gender yang pada gilirannya akan mempengaruhi pembangunan manusia itu sendiri.

Pada suatu kelompok masyarakat, khususnya penduduk yang tergolong usia kerja, sebagian dari mereka diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam perekonomian. Selain menggambarkan daya serap perekonomian terhadap pertumbuhan tenaga kerja, indikator tenaga kerja juga dapat menggambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja menurut sektor dan wilayah.

Penduduk usia kerja terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang terlibat atau sedang berusaha terlibat di dalam aktivitas ekonomi produktif. Sedangkan bukan

angkatan kerja adalah mereka yang tidak terlibat secara aktif dalam aktivitas ekonomi, misalnya anak sekolah, ibu rumah tangga, orang-orang tua, dan orang-orang sakit yang sudah tidak mampu lagi bekerja.



Sumber: BPS Kota Bontang (Sakernas 2021, diolah)

**Gambar 4.6. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Kota Bontang, 2010-2021**

Gambar 4.6. menunjukkan jumlah penduduk kota Bontang yang berusia 15 tahun ke atas selama tahun 2010-2021. Grafik tersebut menunjukkan bahwa terus terjadi peningkatan jumlah usia kerja. Hal ini sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2021 tercatat jumlah usia kerja di Kota Bontang sebanyak 135.172 orang atau meningkat sebesar 1,81 persen dari tahun 2020.

Keterlibatan penduduk di dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan membandingkan antara banyaknya penduduk yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja, baik sudah bekerja maupun sedang mencari kerja/ menyiapkan usaha baru, dengan jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas). Perbandingan tersebut dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK). Makin tinggi nilai TPAK makin banyak proporsi penduduk usia kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja.

Selain nilai TPAK, ukuran lain yang sering digunakan untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator TPT didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang sedang berusaha mencari pekerjaan secara aktif dengan jumlah angkatan kerja. Lawan TPT adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Kesempatan kerja memberi gambaran mengenai tingkat penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Pertambahan dan pengurangan penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan dipengaruhi oleh dinamika struktur umur penduduk, jenis kelamin, struktur ekonomi, dan migrasi.

**Tabel 4.6. Indikator Ketenagakerjaan Kota Bontang, 2014 - 2021**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Angkatan kerja	75 621	78 895	NA	77 882	82 683	88 679	91 932	90 071
Bekerja	68 526	69 371	NA	68 190	74 902	80 677	83 232	81 136
Mencari kerja	7 095	9 524	NA	9 692	7 781	8 002	8 700	8 935
TPAK (%)	67,20	68,84	NA	64,52	64,72	68,06	69,24	66,63
TPT (%)	9,38	12,07	NA	12,44	9,41	9,02	9,46	9,92

Sumber : BPS Kota Bontang (Sakernas 2021, diolah)

\*) Pada tahun 2016, BPS tidak melakukan kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional sehingga data ketenagakerjaan di tahun tersebut tidak tersedia

Semakin besar nilai TPT maka makin besar pengurangan kesempatan kerja dan begitu sebaliknya. Perkembangan nilai TPAK dan TPT Kota Bontang diperlihatkan oleh Tabel 4.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bontang

pada tahun 2021 tercatat sebesar 66,63 persen. Nilai ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2020 yang tercatat sebesar 69,24 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadinya penurunan jumlah angkatan kerja yang meliputi penduduk bekerja dan pengangguran.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Bontang pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, yaitu dari 9,46 persen di tahun 2020 menjadi sebesar 9,92 persen pada tahun 2021. Angka tersebut mengandung makna bahwa untuk setiap 100 orang penduduk Kota Bontang yang tergolong ke dalam angkatan kerja, terdapat 9-10 orang yang sedang mencari kerja (pengangguran). Persoalan pengangguran terjadi karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada, tetapi hal itu tidak selalu berlaku mutlak. Persoalan pengangguran dapat pula terjadi karena lapangan pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, tingkat pendidikan, bahkan jenis kelamin tenaga kerja yang ada.

Sebagian orang memang memilih menjadi pengangguran karena memiliki sumber keuangan yang cukup untuk kehidupannya seperti bersumber dari bantuan orang tua, warisan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, selain penambahan lapangan kerja, kesesuaian antara jenis lapangan pekerjaan dengan keterampilan dan jenis kelamin tenaga kerja pun menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator kebijakan adalah dengan tetap melanjutkan pendidikan gratis, sehingga diharapkan dengan makin tingginya kualitas pendidikan masyarakat makin tinggi pula daya saing mereka di dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, dengan lebih banyak lagi mendirikan tempat-tempat pelatihan keterampilan menjadi salah satu cara mengatasi pengangguran. Walaupun tingkat pendidikan formal rendah, namun apabila keterampilan

yang dimiliki mumpuni, seseorang masih dapat bekerja. Program lainnya yang dapat mengatasi pengangguran adalah penyediaan kredit yang mudah dan murah, sehingga diharapkan dapat merangsang para pelaku usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

**Tabel 4.7. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Kota Bontang, 2014-2021**

Status Pekerjaan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Berusaha sendiri	14,60	15,09	NA	12,12	12,29	15,69	15,92	13,51
Usaha dengan buruh tidak tetap	11,07	6,60	NA	7,00	7,40	9,38	10,05	8,93
Usaha dengan buruh tetap	5,17	3,46	NA	2,48	3,68	4,17	3,82	4,31
Buruh/ Karyawan/ Pegawai	56,39	67,00	NA	58,00	68,12	63,80	58,20	61,48
Pekerja Bebas	2,61	3,39	NA	8,06	2,02	1,68	0,99	1,65
Pekerja tidak di bayar	10,15	4,44	NA	12,33	6,46	5,27	11,03	10,13
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>NA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kota Bontang (Sakernas 2021, diolah)

\*) Pada tahun 2016, BPS tidak melakukan kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional sehingga data ketenagakerjaan di tahun tersebut tidak tersedia

Selanjutnya, berdasarkan status pekerjaannya, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu oleh buruh tidak tetap, berusaha

dengan dibantu oleh buruh tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga), dan pekerja bebas. Dalam periode 2014-2021 (lihat Tabel 4.7.), struktur penduduk bekerja di Kota Bontang didominasi oleh pekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pada tahun 2021 tercatat sekitar 61,48 persen pekerja di Kota Bontang yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Kemudian penduduk dengan status pekerjaan berusaha sendiri dan berusaha dengan buruh tidak tetap dengan persentase masing-masing sebesar 13,51 persen dan 8,93 persen. Proporsi penduduk dengan status pekerjaan berusaha dengan buruh tetap, buruh/karyawan/pegawai, dan pekerja bebas adalah yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan proporsi penduduk dengan status usaha dengan buruh/karyawan/pegawai dan pekerja tidak dibayar mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2021 status pekerjaan pekerja bebas merupakan status pekerjaan dengan proporsi terendah.

Kemajuan pembangunan ekonomi melalui gambaran ketengakerjaan diatas di suatu daerah akan berdampak pada tingkat kesejahteraan yang dinikmati masyarakat atau penduduknya. Semakin baik kinerja pembangunan ekonomi di suatu wilayah diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran atau pendapatan penduduknya. Dimensi standar hidup layak dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Rata-rata pengeluaran riil per kapita merupakan indikator dengan perkembangan paling cepat apabila dibandingkan dengan indikator pembangunan manusia lainnya. Dalam prakteknya, peningkatan indikator sosial seperti kesehatan dan pendidikan tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek. Hal ini berbeda dengan komponen daya beli yang dapat bertambah secara nyata dalam waktu yang relatif singkat seiring dengan keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak pertumbuhan

ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Rata-rata pengeluaran riil per kapita Kota Bontang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat rata-rata pengeluaran riil per kapita penduduk Kota Bontang adalah sebesar 16,27 juta rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 16,76 juta rupiah. Bahkan jika ditelusuri sejak 2010, maka telah terjadi kenaikan sebesar 11,06 persen (lihat Gambar 4.7).

Peningkatan pengeluaran tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, terutama kondisi perekonomian secara global, seperti peningkatan harga bahan kebutuhan pokok baik bahan makanan maupun non bahan makanan, peningkatan jumlah penduduk, dan lain-lain. Selain itu peningkatan pengeluaran juga bisa disebabkan oleh peningkatan pendapatan penduduk, sehingga mereka tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya saja, tetapi sudah mulai memikirkan kebutuhan sekunder dan tersier.



Sumber: BPS Kota Bontang

**Gambar 4.7. Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Riil Per Kapita (000 rupiah) Kota Bontang, 2010-2021**

Langkah intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mendekatkan pemukiman pada akses pasar (komoditas) yang berada di nya sehingga mudah dijangkau;
2. Memberikan tambahan keterampilan pemenuhan variasi asupan keluarga;
3. Meningkatkan pendapatan/kesejahteraan yang berimplikasi pada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.

Pendekatan melalui pengeluaran yang merefleksikan pendapatan merupakan ukuran kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan layak. Keterkaitan masalah pendapatan tentunya berhubungan dengan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan kemampuan daya beli masyarakat, variabel subkomponen pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas, PDRB per kapita;
2. Pendidikan, meliputi persentase penduduk tamat SLTA atau lebih tinggi;
3. Lapangan pekerjaan, meliputi persentase angkatan kerja di sektor sekunder;
4. Status pekerjaan.

Variabel di atas sangat dominan dalam mempengaruhi pendapatan yang pada tahap selanjutnya akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, variabel-variabel di atas termasuk subvariabel yang eksis dalam mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat, sehingga sebaiknya mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh komponen pendapatan merupakan komponen yang sangat rawan dalam

melahirkan ketimpangan distribusi pendapatan, kecemburuan sosial serta masalah pengangguran dan kemiskinan.

**Tabel 4.8. Struktur Perekonomian Kota Bontang dengan Migas, 2021**

No	Lapangan Usaha	PDRB 2021	
		Nilai	Persentase Distribusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	713 553,45	1,23
2	Pertambangan dan Penggalian	294 564,21	0,51
3	Industri Pengolahan	46 018 554,68	79,41
4	Pengadaan Listrik dan Gas	21 064,62	0,04
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15 594,52	0,03
6	Konstruksi	3 761 211,95	6,49
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 919 402,74	3,31
8	Transportasi dan Pergudangan	959 643,47	1,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	331 155,74	0,57
10	Informasi dan Komunikasi	506 000,67	0,87
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	486 688,81	0,84
12	Real Estate	288 932,13	0,50
13	Jasa Perusahaan	287 977,75	0,50
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	814 587,38	1,41
15	Jasa Pendidikan	699 091,61	1,21
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	594 834,34	1,03
17	Jasa Lainnya	236 699,00	0,41
<b>Total</b>		<b>57 949 557,05</b>	<b>100,00</b>

\*\* angka sementara

Sumber: BPS Kota Bontang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan perekonomian di

suatu wilayah. PDRB tersebut dapat juga sebagai sarana untuk mengetahui sektor mana saja yang dapat dikembangkan serta mampu menampung tenaga kerja yang besar sehingga dapat menjawab permasalahan ketenagakerjaan yang ada.

Indikator yang dapat diturunkan dari besaran PDRB adalah struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi menunjukkan peranan nilai tambah bruto masing-masing sektor ekonomi terhadap nilai PDRB. Peranan tersebut juga akan berimplikasi pada besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Perekonomian Kota Bontang ditopang oleh aktivitas dua perusahaan besar yang ada di kota ini yaitu PT. BADA NGL dan PT. Pupuk Kaltim.

Kontribusi PT. BADA NGL dan PT. Pupuk Kaltim bagi perekonomian Kota Bontang terlihat sejak tahun 2010 hingga 2021. Selama periode tersebut, kontribusi sektor ini di atas 70 persen. Akan tetapi, kontribusi dari lapangan usaha Industri Pengolahan cenderung mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari bahan baku yang berasal dari sumber daya alam yang tidak terbarukan yang jumlahnya semakin berkurang. Apabila pada tahun 2010, kontribusi pada Industri Pengolahan berada pada angka 88,69 persen maka pada tahun 2021 kontribusinya turun menjadi 79,41 persen.

Setelah Industri Pengolahan, lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian Kota Bontang di tahun 2021 adalah Konstruksi (Bangunan) yaitu sebesar 6,49 persen, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mampu berkontribusi 3,31 persen terhadap nilai PDRB Kota Bontang.

Indikator berikutnya yang dapat diturunkan dari nilai PDRB adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita yang diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada kondisi pertengahan tahun.

Perkembangan PDRB per kapita dengan migas Kota Bontang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi produksi subsektor Industri Migas dan kenaikan harga migas terhadap nilai tukar mata uang Dollar Amerika di pasaran internasional. PDRB per Kapita dengan Migas dan Tanpa Migas Kota Bontang Tahun 2017-2021 dapat di lihat pada Tabel 4.9.

PDRB per kapita dengan migas Kota Bontang cenderung mengalami penurunan selama tahun 2017 hingga 2021. Nilai PDRB per kapita dengan migas pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 345,14 juta rupiah. Nilai tersebut kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019 menjadi sebesar 337,45 dan 327,06 juta rupiah. Nilai tersebut sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 331,87 juta rupiah namun turun kembali pada tahun 2021 menjadi 320,44 juta rupiah.

**Tabel 4.9. Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB dengan Migas dan Tanpa Migas Kota Bontang (ribu rupiah), 2017-2021**

<b>PDRB Per Kapita</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dengan Migas	345 185,85	337 450,41	327 061,56	311 876,92	320 441,25
Tanpa Migas	151 972,18	159 319,64	174 230,14	180 831,82	191 833,88

\* angka sementara

\*\* angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Bontang

Kontribusi sektor migas dikeluarkan (tanpa migas), nilai PDRB per kapita justru cenderung mengalami peningkatan sepanjang tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017, nilai PDRB per kapita sebesar 151,97 juta rupiah. Nilai tersebut meningkat 26 persen pada tahun 2021 menjadi 191,83 juta rupiah.

PDRB merupakan indikator kinerja suatu wilayah dalam mengelola faktor produksi yang dimiliki secara komersil untuk menghasilkan nilai tambah. Oleh sebab itu, besaran nilai PDRB suatu daerah sangat bergantung pada kemampuan faktor produksi dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki. Salah satu indikator yang diturunkan dari PDRB adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perubahan jumlah produksi barang dan jasa pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.

**Tabel 4.10. Perkembangan PDRB Migas dan Tanpa Migas ADHB Kota Bontang, 2010-2021**

Tahun	Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah)	
	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)
2010	54 258 700,03	12 587 203,08
2011	55 625 376,47	14 542 329,79
2012	54 511 513,81	17 760 358,37
2013	56 278 078,73	20 800 710,07
2014	59 055 313,39	21 155 525,24
2015	58 600 855,04	24 029 912,41
2016	55 239 308,65	24 819 928,58
2017	58 885 677,79	25 928 125,13
2018	58 785 886,17	27 754 437,58
2019	58 006 656,54	30 900 935,35
2020*	55 663 480,47	32 274 681,70
2021**	57 949 557,05	34 691 815,24

\*\* angka sementara

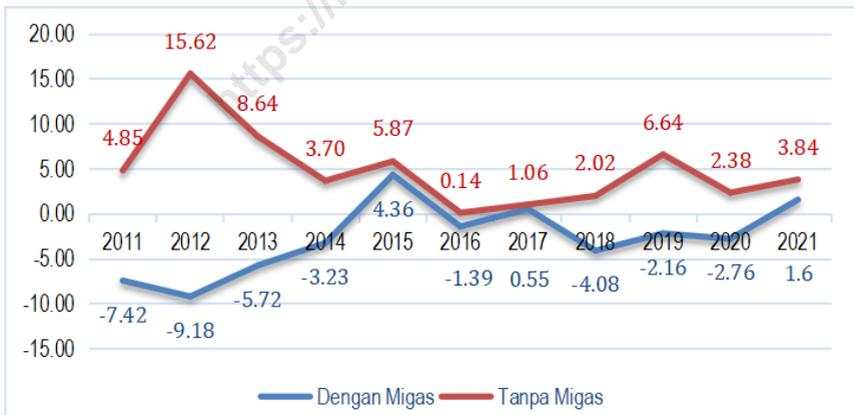
\*\* angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Bontang

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat bergantung pada jenis lapangan usaha yang beraktivitas di wilayah tersebut. Sebagai kota yang merupakan tempat beroperasinya dua perusahaan besar, yaitu PT. BADA NGL

dan PT. Pupuk Kaltim, maka perekonomian Kota Bontang sangat didominasi oleh kedua perusahaan itu. Nilai PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan Tabel 4.10, dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku sebesar 54,25 triliun. Nilai tersebut berfluktuatif hingga tahun 2021 menjadi sebesar 57,94 triliun. Hal tersebut selain dipengaruhi oleh perubahan jumlah produksi barang dan jasa juga dipengaruhi oleh perubahan harga-harga komoditas.

Nilai PDRB Kota Bontang pada tahun 2021 telah memberikan kontribusi 8,34 persen terhadap nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Nilai PDRB Kota Bontang sendiri utamanya disumbang oleh nilai tambah subsektor gas alam cair (LNG) yang merupakan produk utama PT. BADAK NGL dan sektor industri pengolahan yaitu komoditas pupuk yang merupakan produk utama PT. Pupuk Kaltim.



Sumber: BPS Kota Bontang

**Gambar 4.8. Laju Pertumbuhan PDRB Dengan Migas dan Tanpa Migas Kota Bontang, 2011-2021 (persen)**

Tahapan kepentingan untuk analisis, PDRB dapat disajikan dengan migas dan tanpa migas. PDRB tanpa migas dihasilkan dengan cara mengeluarkan komponen minyak dan gas alam pada pertambangan dan industri pengolahan dari penghitungan PDRB. Hal tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan perekonomian suatu wilayah di luar sektor migas. Sepanjang tahun 2021, aktivitas ekonomi Kota Bontang tercatat menghasilkan nilai tambah tanpa migas sebesar 34,69 triliun rupiah. Perbedaan yang cukup signifikan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas dan tanpa migas menunjukkan bahwa perekonomian Kota Bontang bertumpu pada sektor migas terutama gas alam cair (LNG). Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dengan menyertakan peran sektor migas selama periode 2011-2021 cenderung bernilai negatif kecuali pada tahun 2015, 2017, dan 2021 dengan pertumbuhan masing-masing 4,36 persen, 0,55 persen, dan 1,60 persen (untuk 2021 angka sangat sementara). Apabila peran sektor migas dihilangkan dari penghitungan pertumbuhan ekonomi, maka nilainya selalu positif selama periode 2011-2021. Hal tersebut menunjukkan besarnya peran sektor migas dalam menentukan pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang. Gambar 4.8. menunjukkan bagaimana pola pertumbuhan ekonomi Kota Bontang baik dengan migas maupun tanpa migas selama periode 2011-2021.

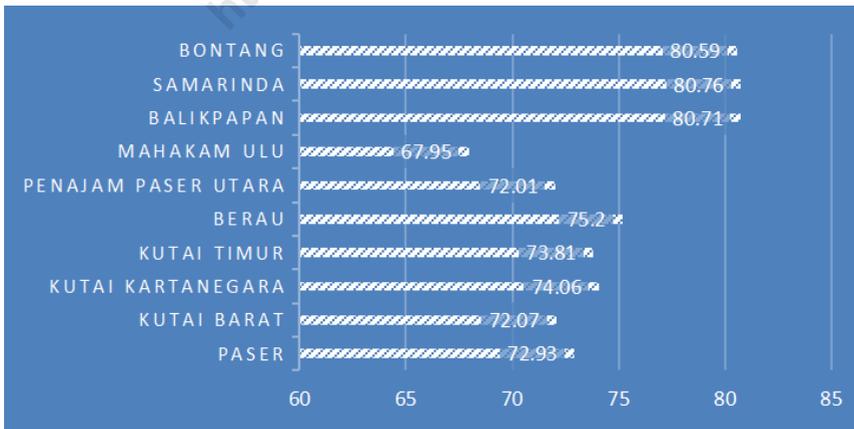
Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah pada periode tertentu dibandingkan dengan jumlah produksi barang dan jasa pada periode sebelumnya. Pertumbuhan yang positif menandakan terjadi kenaikan jumlah produksi barang dan jasa, sebaliknya pertumbuhan negatif menandakan terjadi penurunan produksi barang dan jasa.

Jika dilihat pertumbuhan PDRB Kota Bontang dengan migas, terlihat bahwa sebelum tahun 2015 terjadi kecenderungan pertumbuhan ekonomi

yang negatif, sedangkan pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi menjadi positif. Namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 dan naik lagi di tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang fluktuatif selama periode tersebut tentunya tidak terlepas dari kondisi ekonomi nasional. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang negatif di tahun 2016 disebabkan oleh menurunnya produksi dari sektor industri pengolahan gas alam cair dan pupuk.

#### 4.4. Keterbandingan IPM Antar Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Membandingkan IPM antar Kabupaten/Kota dalam satu propinsi bukanlah untuk melihat memberi kesan negatif bagi daerah yang memiliki IPM yang lebih rendah. Namun, bertujuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia di daerah-daerah yang dibandingkan tersebut. Tujuannya adalah agar semua daerah terus terpacu untuk dalam meningkatkan kapasitas manusia di daerahnya masing-masing.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

**Gambar 4.9. Keterbandingan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2021**

Secara umum tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam susunan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Berdasarkan Gambar 4.9., IPM dengan status sangat tinggi diduduki oleh Kota Samarinda, Bontang, dan Balikpapan. IPM dengan status tinggi diduduki oleh Kabupaten Penajam Paser Utara, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Paser. Status IPM kategori sedang adalah kabupaten Mahakam Ulu.

**Tabel 4.11. Indikator Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, 2021**

Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	Penge-luaran Riil Perkapita (Ribu Rp/ Kapita/ Tahun)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALIMANTAN TIMUR	74,61	13,81	9,84	12 116	76,88
Paser	72,88	13,25	8,79	10 673	72,93
Kutai Barat	73,10	13,02	8,70	10 062	72,07
Kutai Kartanegara	72,64	13,60	9,23	11 048	74,06
Kutai Timur	73,46	12,90	9,43	10 868	73,81
Berau	72,32	13,33	9,53	12 435	75,20
Penajam Paser Utara	71,68	12,57	8,36	11 651	72,01
Mahakam Ulu	72,33	12,61	8,18	7 802	67,95
Balikpapan	74,76	14,22	10,91	14 862	80,71
Samarinda	74,54	15,09	10,49	14 582	80,76
Bontang	74,55	13,17	10,80	16 765	80,59

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Jika membandingkan capaian IPM dari seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Kota Bontang patut berbangga. Sebab di tengah-tengah upaya pembangunan di masing-masing daerah, Kota Bontang masih menjadi peringkat ketiga untuk bisa disalip keberhasilan pembangunan manusianya. Tiap daerah tentunya tak akan pernah berhenti dalam memajukan kualitas penduduknya, tetapi ternyata Bontang masih menjadi yang tercepat dalam melakukannya.

Meski menjadi peringkat ke-3 IPM di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021, berdasarkan Tabel 4.11. terdapat beberapa indeks yang harus menjadi perhatian pemerintah Kota Bontang terutama Harapan Lama Sekolah yang menempatkan Bontang pada posisi ke-6. Selain itu yang tak kalah penting adalah upaya untuk terus meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan menurunkan Angka Kematian Bayi (IMR) agar meningkatkan AHH Kota Bontang, yang pada tahun 2021 berada di posisi kedua di Provinsi Kalimantan Timur.

Tapi mesti juga disadari bahwa pembangunan yang bervariasi antar Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk di Kalimantan Timur, tentunya memberikan gambaran pada kita bahwa masih terjadi ketidakmerataan perkembangan pembangunan di banyak sektor. Karena seperti yang kita tahu, walaupun IPM dihitung dari 3 dimensi sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, tetapi faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam perhitungan pastilah memberi pengaruh juga.

Sehingga dengan publikasi analisis pembangunan manusia ini, akan membuka cakrawala berpikir kita bahwa pembangunan manusia masih merupakan tugas berat yang harus dilakukan dan diperjuangkan. Untuk itu diperlukan komitmen pemerintah di masing-masing daerah terutama di daerah dengan IPM yang masih di bawah 70 (rendah). Semoga

pemerataan pembangunan terus terjadi, sehingga dampak pembangunan yang sesungguhnya bisa dirasakan seluruh masyarakat baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan.

<https://bontangkota.bps.go.id>



...

## Bab 5 Penutup

<https://bontangkota.bps.go.id>





## 5.5. Kesimpulan

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan (BPS). Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar manusia memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Prinsip pembangunan manusia adalah azas pemerataan yang diimplementasikan dalam berbagai program pembangunan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan terjadi peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk yang diperoleh melalui proses pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan manusia sebagai subsistem pembangunan diharapkan dapat menimbulkan keragaman dan diversifikasi dalam kegiatan masyarakat. Makin beragam kegiatan masyarakat makin besar pula kemampuan mereka dalam mengembangkan pilihan-pilihannya. Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia akan dapat meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui kemampuan mengelola sumber daya untuk memperoleh hasil yang optimal.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM dijadikan sebagai salah satu ukuran utama dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah yakni menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan pembangunan daerah. Pertimbangan lain adalah IPM dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu sebagai alat ukur pemantauan status pembangunan manusia, karena IPM sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Pendekatan hak dalam pembangunan manusia selaras dengan pengembangan dan prakarsa Strategi Penghapusan Kemiskinan (Bebas Kemiskinan) atau Program Strategi Penghapusan Kemiskinan Nasional (SPKN) di tingkat Nasional, dan upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Milenium (MDGs).

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Tahun 2021 adalah:

1. Angka IPM mengalami perubahan metodologi penghitungan sejak tahun 2014, alasannya adalah (1) beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan serta PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah, (2) Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.
2. Melalui penghitungan IPM metode baru, Kota Bontang menjadi daerah di Kalimantan Timur nilai IPM yang terus meningkat. Selama periode tersebut IPM Kota Bontang telah naik dari 76,97 di tahun 2010 menjadi 80,59 di tahun 2021 atau naik sebesar 3,12 poin.
3. Seluruh komponen IPM Kota Bontang di tahun 2021 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan AHH, HLS, RLS, dan Pengeluaran perkapita masing-masing sebesar 0,36 persen, 1,07 persen, 0,09 persen, dan 2,99 persen. Kenaikan ini bisa menjadi indikasi bahwa pembangunan di Kota Bontang

terus berjalan baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian.

4. Peningkatan angka harapan hidup di Kota Bontang menunjukkan taraf kesehatan penduduk Kota Bontang yang makin baik. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jamkesda dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya secara dini.
5. Di bidang pendidikan, Harapan Lama Sekolah Kota Bontang mencapai nilai sebesar 13,17 tahun. Angka ini mengandung makna bahwa dari seluruh penduduk Kota Bontang berusia 7 tahun ke atas, mempunyai harapan lama sekolah 13 tahun 2 bulan. Angka ini setingkat memasuki Semester 3 pada perguruan Tinggi. Hal tersebut dapat terwujud antara lain karena adanya kebijakan Pemerintah Kota Bontang yang membebaskan biaya pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat SMA. Implikasi lainnya adalah rata-rata lama sekolah Kota Bontang yang terus meningkat hingga mencapai 10,80 tahun pada tahun 2021. Dengan kata lain, secara rata-rata penduduk Kota Bontang telah menempuh pendidikan 10 tahun 9 bulan lebih atau rata-rata setingkat kelas 1 SMA.
6. Di bidang ekonomi juga terjadi peningkatan pendapatan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan. Hal itu dapat dilihat pada kenaikan rata-rata pengeluaran riil per kapita. Pada Tahun 2020 rata-rata pengeluaran riil per kapita Kota Bontang adalah sebesar 16.278 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi 16.765 juta rupiah di tahun 2021.

7. Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang di tahun 2021 meningkat sebesar 0,57 poin dari tahun lalu sehingga mencapai nilai 80,59.

## 5.6. Saran

Capaian IPM Kota Bontang di tahun 2021 masih menggembirakan dengan status sangat tinggi. Kota Bontang unggul dalam pencapaian rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengeluaran riil perkapita Kota Bontang merupakan dampak dari keberadaan dua industri pengolahan berskala internasional di Kota Bontang. Hingga saat ini kedua industri tersebut memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Kota Bontang yang pada tahun 2021 mencapai 79,41 persen. Dominasi industri ini harus menjadi perhatian pemerintah karena keduanya mengandalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga menggerakkan perekonomian dari sektor-sektor lain harus mulai dilakukan.

Capaian IPM Kota Bontang dalam bidang kesehatan yang tercermin dalam angka harapan hidup (AHH). Meskipun sudah cukup tinggi, tetapi gerakan-gerakan untuk meningkatkan usia hidup seseorang perlu terus dilakukan. Tentunya tidak hanya berumur panjang tetapi juga sehat dan bisa aktif dalam masyarakat. Peningkatan AHH merupakan keberhasilan dalam menurunkan Angka Kematian Bayi (IMR). Semakin rendah IMR maka AHH akan semakin tinggi. Upaya yang dapat dilakukan dalam menurunkan IMR adalah menjaga kesehatan lingkungan, sanitasi, kualitas sumber air, dan perilaku hidup bersih. Selain itu penyediaan fasilitas kesehatan yang lengkap

dan terjangkau. Upaya tak kalah penting adalah menumbuhkan kesadaran di masyarakat pentingnya kesehatan untuk masa depan yang lebih baik.

Meningkatnya angka harapan hidup juga menjadi tantangan bagi Pemerintah terutama dalam penyediaan fasilitas yang ramah pada usia lanjut. Sehingga peningkatan AHH tidak dianggap menjadi tambahan beban bagi masyarakat. Sebagaimana di sebutkan pada bagian sebelumnya gerakan investasi/menabung di masa muda harus menjadi kebiasaan, sehingga pada masa tua bisa hidup mandiri secara ekonomi dan tidak lagi terlalu tergantung pada orang lain. Ketersediaan tempat tinggal yang layak huni dan sanitasi yang bersih perlu ditingkatkan lagi untuk mendukung program masyarakat Kota Bontang yang sehat.

Di bidang pendidikan, perlunya perhatian khusus terutama yang berkaitan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS Kota Bontang berada di urutan ke enam diantara kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang menunjukkan masih diperlukannya kebijakan pemerintah terkait tersedianya sarana prasarana sekolah yaitu tingkat Perguruan Tinggi yang masih terbatas pilihannya untuk meningkatkan HLS tersebut.

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, namun tidak berarti anti pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Perhatian pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada aspek pendistribusiannya. Jadi bukan hanya masalah berapa besar pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan yang seperti apa. Perhatian harus lebih ditujukan pada struktur dan kualitas pertumbuhan tersebut, sehingga dapat menjamin bahwa pertumbuhan diarahkan untuk

mendukung perbaikan kesejahteraan manusia baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Perhatian utama dari kebijakan pembangunan haruslah ditekankan pada bagaimana keterkaitan tersebut dapat diciptakan dan diperkuat.

<https://bontangkota.bps.go.id>



**ST 2023**

**SENSUS PERTANIAN**

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



<https://bontangkota.bps.go.id>

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Indeks Pembangunan

**Manusia**

KOTA BONTANG 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BONTANG**

Jl. Awang Long No. 02 RT 08 Kota Bontang

Telp. (0548)26066 fax. (0548)27706

Email: bps6474@bps.go.id Homepage: <http://bontangkota.bps.go.id>

ISSN 2656-9256



9 772656 925006